

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dalam pertumbuhan perekonomian di suatu daerah selalu terikat dengan peran aktif dari lembaga keuangan yang berada dalam daerah tersebut. Salah satu lembaga keuangan yang memiliki peran aktif yaitu Credit Union (CU). Credit Union merupakan salah satu lembaga keuangan yang berperan untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang di hadapi oleh masyarakat dengan memberikan fasilitas peminjaman atau pemberian kredit kepada masyarakat demi memenuhi kebutuhan dan kelangsungan hidup yang dianggap kurang memadai dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai lembaga keuangan yang memiliki peran penting bagi perusahaan-perusahaan terutama bagi para pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

Dalam menjalankan usahanya, para pemilik usaha membutuhkan dana untuk membiayai kegiatan usaha dan untuk mengembangkan usahanya sendiri. Lembaga keuangan juga memiliki peranan dalam menghimpun dana dari masyarakat berupa simpanan (tabungan), dan memberikan pinjaman. Dengan peran aktif lembaga keuangan salah satunya dimiliki oleh CU yang dapat dilihat dari fungsi yang telah dijalankan dalam roda perekonomian, yaitu sebagai lembaga yang menghubungkan antar pihak-pihak yang memiliki dana lebih dengan pihak-pihak yang memerlukan dana. Adapun pihak-pihak yang memerlukan dana atau nasabah yaitu meliputi : petani, nelayan, buruh, karyawan, dan PNS.

Dalam hal pemberian kredit, CU juga tidak terlepas dari suatu hambatan atau tantangan. Sering sekali dalam hal pembayaran yang dilakukan mengalami kemacetan (kredit macet) atau tidak dibayarkan oleh nasabah. Dengan terjadinya masalah tersebut dapat mengakibatkan permasalahan dan juga kegagalan dalam hal pembiayaan. Hal tersebut disebabkan oleh faktor eksternal yaitu Nasabah dan faktor internal yaitu Pihak CU.

Kredit merupakan kemampuan untuk memberikan pinjaman dengan suatu janji yang akan dibayarkan sesuai dengan waktu yang telah disepakati antara kedua belah pihak. Kredit merupakan aktiva produktif yang dapat memberikan pendapatan utama. Semakin besar tingkat pemberian kredit dari keseluruhan pemberian kredit maka akan semakin besar pula jumlah investasi yang dimiliki oleh organisasi atau perusahaan. Dengan adanya pemberian kredit yang dilakukan, maka dapat mengurangi kemungkinan resiko seperti penambahan pegawai dan pengurusan administrasi. Agar kegiatan perkreditan ini dapat dilakukan dan berjalan dengan baik serta sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, Maka perlu diterapkan suatu sistem pemberian kredit yang baik. Maka dengan hal tersebut unsur-unsur sistem pengendalian intern yang baik akan berpengaruh terhadap berjalannya sistem pemberian kredit yang baik pula.

Adapun masalah kredit yang disalurkan dan sering terjadi di Koperasi Kredit CU Sepakat Sibolga terutama dalam tahun belakangan ini, tepatnya pada tahun 2019 yaitu: Pertama, ketidaktepatan waktu dalam hal pembayaran pokok dan pembayaran bunga pinjaman. Sehingga dengan demikian menjadi penghalang dalam hal pembayaran pokok dan pembayaran bunga pinjaman yang telah

dipinjam. Kedua, adanya masalah dari pihak debitur yang mengalami kegagalan dalam usahanya termasuk kebangkrutan, bencana alam, dll. Dengan demikian mengakibatkan ketidakadaan dana untuk membayar angsuran tersebut. Maka dengan demikian akan menjadi salah satu penghalang atau masalah yang terjadi di Koperasi Kredit CU Sepakat Sibolga.

Dalam pemberian kredit CU harus memberikan perhatian khusus terhadap calon debitur (nasabah). Karena demikian CU memiliki peran tanggungjawab atas dana nasabah yang diberikan calon nasabah. Keputusan pemberian kredit sangat memiliki resiko ataupun tantangan yang tinggi atas ketidakmapuaan para debitur dalam membayar kewajiban kreditnya ketika jatuh tempo. Dalam pelaksanaan pemberian kredit kepada para nasabah disuatu tempat CU, pengendalian intern harus dapat dilaksanakan sebaik-baiknya. Dengan terlaksananya pengendalian intern yang baik akan sangat mempengaruhi organisasi dalam menghindari adanya fraud atau kecurangan-kecurangan yang dapat merugikan nasabah serta juga merugikan CU itu sendiri.

Pengendalian intern kredit merupakan usaha yang ada untuk menjaga kredit yang akan diberikan tetap lancar, produktif, dan tidak macet. Adapun tujuan utama dari pengendalian intern kredit dalam suatu CU yaitu untuk menjaga agar kredit yang telah disalurkan akan tetap aman, dan untuk mengetahui apakah kredit yang telah disalurkan lancar atau tidak lancar, kemudian melakukan tindakan pencegahan dan penyelesaian kredit macet, mengevaluasi apakah prosedur penyaluran kredit yang dilakukan telah baik atau masih perlu untuk disempurnakan, memperbaiki kesalahan-kesalahan karyawan analisis kredit dan

juga mengusahakan agar kesalahan tersebut tidak terulang kembali dan meningkatkan moral dan tanggungjawab dari karyawan.

Tetapi dalam hal pemberian kredit tidak selalu berjalan dengan lancar dan dengan baik seperti yang diharapkan oleh CU. Sering sekali terjadi saat pihak dari CU mengalami kesulitan untuk menagih atau meminta angsuran dari pihak debitur karena adanya suatu hal tertentu. Oleh karena itu, harus dilakukan pengawasan dan harus ditetapkan kehati-hatian yang ketat yang berguna untuk mengantisipasi terjadinya kredit macet pada para debitur.

Alasan perusahaan untuk menyusun pengendalian intern dalam Koperasi Kredit CU Sepakat Sibolga yaitu untuk membantu dalam mencapai tujuannya yaitu manajemen dalam menjalankan fungsinya membutuhkan sistem pengendalian yang dapat menggunakan harta perusahaan, memberikan keyakinan bahwa apa yang dilaporkan adalah benar-benar dapat dipercaya dan dapat mendorong adanya efisiensi usaha serta dapat terus menerus memantau bahwa kebijakan yang telah ditetapkan memang dijalankan sesuai dengan apa yang telah diharapkan.

Credit Union juga harus benar-benar memperhatikan dipatuhinya sistem pengendalian intern dalam pemberian kredit sehingga dengan adanya demikian maka resiko akan adanya kredit yang bermasalah dapat diperkecil. Semakin banyak jumlah kredit yang disalurkan kepada masyarakat maka resiko yang akan terjadi semakin besar pula. Kredit yang bermasalah akan dapat mengganggu kelancaran usaha dari Credit Union (CU) yang tentunya dapat mengakibatkan krisis kepercayaan dari masyarakat.

Dengan terselenggaranya suatu pengendalian intern yang dapat memadai dalam bidang kredit, berarti dapat menunjukkan sikap kehati-hatian didalam pemberian kredit tersebut. Pengendalian intern yang memadai pada dasarnya bertujuan untuk melindungi harta milik organisasi dengan cara meminimalkan terjadinya penyelewengan, pemborosan, dan kredit macet. Pengendalian intern yang memadai diharapkan dapat menjamin proses pemberian kredit tersebut agar terhindar dari segala bentuk kesalahan atau penyelewengan-penyelewengan.

Dalam pemberian kredit, CU harus benar-benar memperhatikan dipatuhinya sistem pengendalian intern dalam hal pemberian fasilitas kredit sehingga dengan demikian resiko atau hambatan akan terjadinya kredit yang bermasalah dapat diperkecil. Dengan adanya kredit yang bermasalah dapat mengganggu atau menghambat kelancaran usaha CU yang tentunya pasti akan menimbulkan krisis kepercayaan dari masyarakat. Dengan terselenggaranya sistem pengendalian intern yang memadai, terutama dalam bidang perkreditan berarti menunjukkan adanya sikap kehati-hatian CU dalam menjaga kepercayaan dari para debitur atau masyarakat dan dalam menjaga kelangsungan hidup usahanya.

Koperasi Kredit CU Sepakat Sibolga yang berdiri di Jl. Sisingamangaraja No. 486, Kota Sibolga, Sibolga Selatan, Sumatera Utara, didirikan untuk membantu para masyarakat dan mendorong pertumbuhan perekonomian dari masyarakat. Koperasi Kredit CU Sepakat merupakan salah satu lembaga keuangan yang bergerak dalam bidang pemberian kredit mikro pada Koperasi Kredit CU Sepakat Sibolga, Kota Sibolga Sumatera Utara yang memberikan pelayanan kepada para nasabah atau debitur khususnya kepada para pedagang,

pengusaha dan kepada masyarakat dengan mengharapkan laba atau keuntungan yang diperoleh dari bunga kredit tersebut. Untuk mampu berperan sebagai badan usaha yang kuat, koperasi kredit CU Sepakat melalui usaha pemberian kreditnya harus mampu meningkatkan efektivitas sistem pemberian dan berusaha agar mampu mengurangi resiko kegagalan dalam pemberian kedit. Dengan demikian dengan perlunya Sistem Pengendalian Intern dalam Koperasi Kredit CU Sepakat Sibolga untuk mengurangi resiko kegagalan dalam hal pemberian kredit. Maka dengan demikian menunjukkan adanya sikap kehati-hatian dalam hal menjaga kepercayaan dari para debitur. Maka dengan ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Analisis Pengendalian Intern pada Sistem Pemberian Kredit pada Koperasi Kredit *Credit Union* Sepakat Sibolga”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dalam penelitian ini berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut: “Bagaimana Sistem Pengendalian Intern Pada Proses Pemberian Kredit yang telah diterapkan pada Koperasi CU Sepakat Sibolga”.

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis sistem pengendalian intern pada proses pemberiaan kredit telah diterapkan pada Koperasi CU Sepakat Sibolga.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. Bagi penulis

Penelitian ini merupakan kesempatan untuk menerapkan dan mengembangkan pengetahuan yang berhubungan dengan Sistem Pengendalian Intern Pemberian Kredit di Koperasi CU Sepakat Sibolga.

2. Bagi Koperasi CU Sepakat Sibolga

Hasil dari penelitian ini dapat memberikan sebagai bahan informasi tambahan dan masukan yang dapat dijadikan pertimbangan di dalam perbaikan dan pengembangan koperasi CU Sepakat, terutama dalam mengenai Sistem pengendalian Intern pada Pemberian Kredit.

3. Sebagai bahan masukan

Sebagai bahan masukan informasi dan perbandingan bagi peneliti selanjutnya dengan judul yang sama dimasa yang akan datang.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Sistem Pengendalian Intern**

##### **2.1.1 Pengertian Sistem Pengendalian Intern**

Sistem pengendalian intern mempunyai peran yang sangat penting dalam suatu organisasi suatu perusahaan. Sistem pengendalian intern merupakan suatu alat yang dapat membantu manajemen dalam melaksanakan tugasnya. Sistem pengendalian intern juga dapat membantu manajemen dalam menilai suatu organisasi yang ada serta operasi yang dilakukan perusahaan. Sistem pengendalian intern juga sangat diperlukan dalam suatu perusahaan karena apabila dalam suatu perusahaan memiliki pengendalian intern yang baik maka akan meminimalkan segala sesuatu bentuk kesalahan ataupun penyelewengan terhadap kas perusahaan tersebut. Untuk itu maka perlunya pengendalian intern yang harus diterapkan pada setiap perusahaan.

Sistem pengendalian intern merupakan suatu istilah yang digunakan untuk mendefinisikan berbagai ukuran yang dilaksanakan oleh manajemen CU untuk mengawasi dan mengarahkan para pegawainya dalam melaksanakan pekerjaannya. Sistem pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dapat dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, memeriksa ketelitian dan keandalan data akuntansi dan mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.



Menurut Simanjuntak dan Siringoringo bahwa :

**“Pengendalian Internal (*internal control*) meliputi semua perencanaan dari suatu organisasi dan semua metode serta prosedur yang ditetapkan oleh manajemen dalam rangka untuk : 1. Menjaga harta perusahaan dan pencurian oleh karyawan, perampokan, serta penggunaan yang tidak diotorisasi; 2. Meningkatkan akuntansi dan kepercayaan dari catatan akuntansi dengan cara mengurangi resiko kesalahan (*error*) dan iregulasi (*irregulati*) dalam proses akuntansi yang dilakukan”.**<sup>1</sup>

Sedangkan menurut Diana dalam Nasution (2020) mengatakan bahwa :

**“Pengendalian intern sebagai rencana organisasi, metode dan pengukuran yang dipilih oleh kegiatan usaha untuk mengamankan harta kekayaannya, mengecek keakuratan dan keandalan data akuntansi usaha tersebut, meningkatkan efisiensi operasional, dan mendukung dipatuhinya kebijakan manajerial yang telah ditetapkan”.**<sup>2</sup>

Sedangkan menurut Randal J.Elder, Mark S.Beasley, Alvin A.Arens dan Amir Abadi Jusuf dalam Nasution (2020) mengemukakan bahwa kebijakan dan prosedur tersebut sering disebut sebagai pengendalian, dan secara kolektif, akan

---

<sup>1</sup> Oloan Simanjuntak dan Magdalena Judika Siringoringo, **Pengantar Akuntansi**, Materi Untuk Kalangan Sendiri, Universitas HKBP Nommensen Medan, Medan, 2014, Hal.1

<sup>2</sup> Bimelda Afrian Nasution, **Analisis Sistem Pengendalian Intern Dalam Pemberian Kredit Pada PT. BPR Bina Barumon**, Skripsi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara 2020, hal.16

membentuk suatu pengendalian internal entitas. Manajemen biasanya memiliki tiga tujuan umum dalam merancang sistem pengendalian intern sebagai berikut :

- 1. Keandalan pelaporan keuangan ,**
- 2. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku,**
- 3. Efektivitas dan efisiensi operasi.<sup>3</sup>**

Dari defenisi pengendalian intern diatas terdapat beberapa konsep dasar berikut ini :

Pengendalian intern merupakan suatu proses. Pengendalian intern merupakan suatu proses yaitu salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Dengan adanya pengendalian intern itu sendiri bukan merupakan suatu tujuan. Pengendalian intern merupakan suatu rangkaian tindakan yang bersifat pervasive dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan, bukan hanya sebagai tambahan, dari infrastrukturentitas.

Pengendalian intern dijalankan oleh orang. Dalam hal pengendalian intern dijalankan oleh oleh merupakan bahwa pengendalian intern tersebut bukan hanya terdiri dari pedoman-pedoman kebijakan dan formulir, akan tetapi dijalankan oleh orang dari setiap jenjang organisasi, yang mencakup dewan komisaris, manajemen, dan personel lain.

Pengendalian intern dapat diharapkan mampu memberikan keyakinan memadai, bukan keyakinan mutlak, bagi manajemen dan dewan

---

<sup>3</sup> Loc. Cit

komisaris entitas. Dalam hal keterbatasan yang melekat dalam semua sistem pengendalian intern dan pertimbangan manfaat dan pengorbanan dalam pencapaian tujuan pengendalian menyebabkan pengendalian intern tidak dapat memberikan keyakinan mutlak.

Pengendalian intern ditujukan untuk mencapai tujuan yang saling berkaitan: pelaporan keuangan, kepatuhan, dan operasi.

### **2.1.2 Tujuan Pengendalian intern**

Menurut Mulyadi, tujuan dari pengendalian intern dalam Institusi Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dalam bukunya “Standar Profesional Akuntansi Publik” yaitu untuk memberikan keyakinan memadai dalam pencapaian yang tergolong didalam tiga golongan tujuan yaitu :

- 1. Keandalan Informasi Keuangan**
- 2. Kepatuhan Terhadap Hukum dan Peraturan yang Berlaku**
- 3. Efektivitas dan Efisiensi Operasi<sup>4</sup>**

Dari tujuan pengendalian intern diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Keandalan Informasi Keuangan

Umumnya, pengendalian intern yang relevan dengan suatu audit adalah berkaitan dengan tujuan entitas dalam membuat laporan keuangan bagi pihak luar yang disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

---

<sup>4</sup> Mulyadi, **Auditing**, Edisi Keenam, Cetakan Pertama Salemba Empat, Jakarta, 2002, hal.180

2. Kepatuhan Terhadap Hukum dan Peraturan yang Berlaku

Suatu entitas umumnya mempunyai pengendalian yang berkaitan dengan tujuan yang tidak relevan dengan suatu audit dan oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan.

3. Efektivitas dan Efisiensi Operasi

Pengendalian yang berkaitan dengan tujuan operasi dan kepatuhan mungkin relevan dengan suatu audit, jika kedua tujuan berkaitan dengan data yang dievaluasi dan digunakan auditor dalam proses audit.

Adapun tujuan utama sistem pengendalian intern menurut La Midjan dan Azhar Susanto dalam Nasution (2020) mengemukakan yaitu sebagai berikut :

- a. **Mengutamakan harta kekayaan perusahaan**
- b. **Menguji ketelitian dan kebenaran data akuntansi perusahaan**
- c. **Meningkatkan efisiensi operasi perusahaan**
- d. **Ketaatan pada kebijakan-kebijakan yang digariskan pimpinan perusahaan.**<sup>5</sup>

Sedangkan menurut Harrison dalam Nasution (2020) tujuan pengendalian intern yaitu:

1. **Menjaga asset**
2. **Mendorong karyawan untuk mengikuti kebijakan perusahaan**
3. **Mempromosikan efisiensi operasional**
4. **Memastikan catatan akuntansi yang akurat dan dapat diandalkan**
5. **Menaati persyaratan hukum.**<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Bimelda Afrian Nasution, *Op.Cit.*, hal.16

Dari uraian diatas dapat dijelaskan bahwa tujuan yang ingin dicapai pengendalian intern ini adalah untuk menjaga keamanan harta milik suatu organisasi, memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi, memajukan efisiensi dalam operasi dan membantu agar tidak ada yang menyimpang dari kebijakan manajemen yang telah ditetapkan terlebih dahulu.

### **2.1.3 Unsur-Unsur Pengendalian Intern**

Unsur pengendalian intern merupakan bagian-bagian yang dibentuk dalam memberikan kemungkinan tercapainya pengendalian intern yang cukup memadai sehingga mampu menciptakan data akuntansi yang dapat dipercaya dan dapat diandalkan.

Adapun unsur-unsur pokok dan struktur pokok dari pengendalian intern menurut Mulyadi adalah sebagai berikut :

- 1. Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas.**
- 2. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap asset, utang, pendapatan, dan beban.**
- 3. Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi.**

---

<sup>6</sup> Ibid, Hal.17

#### 4. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya.<sup>7</sup>

Adapun penjelasan mengenai unsur-unsur pokok dan struktur pokok dari pengendalian intern diatas yaitu :

1. Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas. Struktur organisasi merupakan kerangka pembagian tanggung jawab fungsional kepada unit-unit organisasi yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pokok perusahaan. Pembagian tanggung jawab fungsional dalam organisasi ini didasarkan pada prinsip-prinsip berikut ini:
  - a. Harus dipisahkan fungsi-fungsi operasi dan penyimpanan dan fungsi akuntansi. Fungsi operasi adalah fungsi yang memiliki wewenang melaksanakan suatu kegiatan (misalnya pembelian). Setiap kegiatan dalam perusahaan memerlukan otoritas dari manajer fungsi yang memiliki wewenang untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Fungsi penyimpanan adalah fungsi yang memiliki wewenang untuk menyimpan aktiva perusahaan. Fungsi akuntansi adalah fungsi yang memiliki wewenang untuk mencatat peristiwa perusahaan.
  - b. Suatu fungsi tidak boleh diberi tanggung jawab penuh untuk melaksanakan semua tahap suatu transaksi.
2. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap asset, utang, pendapatan, dan beban. Dalam organisasi setiap transaksi hanya terjadi atas dasar otoritas dari pejabat yang wewenang untuk menyetujui terjadinya transaksi tersebut.

---

<sup>7</sup> Mulyadi, **Sistem Akuntansi**, Edisi Keempat: Salemba Empat, 2016, hal.130

Oleh karena itu dalam organisasi harus dibuat sistem yang mengatur pembagian wewenang untuk otoritas atas terlaksananya setiap transaksi dalam organisasi.

3. Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi. pembagian tanggung jawab fungsional dalam sistem wewenang sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang telah ditetapkan tidak akan terlaksanakan dengan baik jika tidak diciptakan cara-cara untuk menjamin praktik yang sehat dalam pelaksanaannya.
4. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya. Unsur mutu karyawan merupakan unsur sistem pengendalian intern yang penting. Karyawan yang jujur dan ahli dalam bidang yang menjadi tanggung jawabnya akan dapat melaksanakan pekerjaannya dengan efektif dan efisien meskipun hanya sedikit unsur sistem pengendalian intern yang mendukungnya.

#### **2.1.4 Komponen Pengendalian Intern**

Pengendalian intern yang baik harus memenuhi beberapa kriteria ataupun komponen. Komponen-komponen dalam pengendalian intern merupakan proses pencapaian yang akan dilakukan oleh pihak organisasi dan yang akan dilakukan oleh pihak manajemen untuk mencapai tujuan keandalan laporan keuangan, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku dan efektivitas dan efisiensi operasi. Menurut Agoes dalam Hutaeruk (2019) bahwa pengendalian

intern yang baik harus memenuhi kriteria atau komponen. Adapun komponen pokok atau unsur-unsur yang saling berkaitan yaitu :

**1. Lingkungan Pengendalian**

**2. Penilaian Resiko**

**3. Informasi dan Komunikasi**

**4. Aktivitas Pengendalian**

**5. Pemantauan<sup>8</sup>**

Adapun penjelasan mengenai kelima unsur atau komponen pokok pengendalian intern diatas yaitu :

1. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian menggambarkan mengenai suasana pengendalian dalam suatu organisasi dan mempengaruhi kesadaran orang-orang yang ada dalam organisasi tentang pengendalian. Lingkungan pengendalian juga merupakan suatu fondasi dari semua komponen pengendalian internal lainnya yang bersifat disiplin dan berstruktur. Dan dapat memberikan acuan disiplin yang meliputi :

- a. Integritas dan Nilai Etika
- b. Komitmen pada Kompetensi
- c. Partisipasi Dewan Komisaris atau Komite Audit
- d. Filosofi dan Gaya Operasi Manajemen
- e. Struktur Organisasi

---

<sup>8</sup> Romaito Hutaaruk, **Analisis Sistem Pengendalian Intern Pemberian Kredit Pada PT Bank SUMUT Medan**, Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area, Medan, 2019, hal.11



- f. Pemberian Wewenang dan Tanggungjawab
- g. Kebijakan dan Praktek Sumber Daya Manusia

## 2. Penilaian Resiko

Merupakan suatu kebijakan dan prosedur yang dapat membantu suatu perusahaan dalam menyakinkan atau menjamin bahwa tugas dan perintah yang diberikan oleh manajemen telah dijadikan. Penilaian resiko untuk tujuan laporan keuangan adalah mengidentifikasi, menganalisis, dan pengelolaan resiko suatu entitas yang relevan dengan penyusunan laporan keuangan yang disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Di dalam proses penilaian resiko oleh manajemen serupa dengan perhatian auditor eksternal dengan resiko bawaan. Keduanya menekankan pada hubungan resiko denngan asersi laporan keuangan tertentu serta aktivitas pencatatan, pemrosesan, pengikhtisaran, dan pelaporan data keuangan. Dan tujuan manajemen adalah untuk menentukan bagaimana mengelola resiko yang diidentifikasi, tujuan auditor adalah untuk mengevaluasi kemungkinan dalam hal salah saji material yang terdapat pada laporan keuangan.

## 3. Aktivitas Pengendalian

Merupakan kebijakan dan prosedur yang dapat membantu suatu perusahaan dalam menyakinkan bahwa tugas dan perintah yang diberikan oleh manajemen telah dilaksanakan. Aktivitas pengendalian membantu memastikan bahwa tindakan yang diperlukan berkenaan dengan resiko yang telah diambil untuk pencapaian tujuan suatu entitas.

#### 4. Informasi dan Komunikasi

Informasi dan komunikasi sangat penting bagi setiap entitas dalam melaksanakan tanggungjawab dari pengendalian internal yang berguna untuk mendukung dalam pencapaian tujuan-tujuannya. Informasi dan komunikasi merupakan pengidentifikasian, penangkapan dan pertukaran informasi dalam suatu bentuk dan kerangka waktu yang membuat orang mampu melaksanakan tanggung jawabnya.

#### 5. Pemantauan

Pemantauan merupakan suatu proses penilaian kualitas kinerja pengendalian intern seperti sepanjang waktu. Pemantauan melibatkan penilaian rancangan dan pengoperasian pengendalian dengan dasar waktu dan mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan.

### **2.1.5 Penanggung Jawab Sistem Pengendalian Internal**

Setiap orang dalam suatu organisasi bertanggung jawab dan menjadi bagian dari pengendalian intern organisasi. Di samping itu, beberapa pihak luar, seperti auditor independen dan badan pengatur (*regulatory body*) dapat membantu organisasi dengan cara memberikan informasi yang bermanfaat bagi manajemen untuk pemberlakuan oengendalian intern dalam organisasi tersebut. Menurut Willian dalam Maruta (2015) adapun pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam pengendalian intern sebagai berikut :

1. **Manajemen**
2. **Dewan komisaris dan komite audit**
3. **Auditor intern**
4. **Personel lain entitas**
5. **Auditor independen<sup>9</sup>**

Dari uraian diatas dapat dijelaskan bahwa pihak-pihak yang bertanggungjawab dalam pengendalian intern memiliki peran sebagai berikut :

1. **Manajemen**

Tanggungjawab manajemen yaitu untuk menciptakan pengendalian internal yang efektif. lingkungan pengendalian yang efektif akan dapat mengurangi kemungkinan kekeliruan atau kecurangan dalam suatu entitas. Manajemen senior yang membawahi unit-unit organisasi harus bertanggungjawab untuk mengendalikan aktivitas dari unit yang dipimpinnya.

2. **Dewan komisaris dan komite audit**

Anggota dewan direksi sebagai bagian dari peraturan umum dan tanggungjawab terhadap kekeliruan, harus menentukan bahwa manajemen telah memenuhi tanggungjawabnya untuk menciptakan dan memelihara pengendalian internal.

---

<sup>9</sup> Heru Maruta, **Pengendalian Internal Dalam Sistem Informasi Akuntansi**, Jurnal Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Bengkalis, 2015, hal.20

### 3. Auditor intern

Auditor internal harus memeriksa dan mengevaluasi kecukupan pengendalian internal suatu entitas secara periodik dan membuat rekomendasi untuk perbaikan, tetapi mereka tidak memiliki tanggungjawab utama untuk menciptakan dan memelihara pengendalian internal.

### 4. Personel lain entitas

Peran dan tanggungjawab dari semua personel lain yang menyediakan informasi kepada, atau menggunakan informasi yang disediakan oleh sistem yang mencakup pengendalian internal, harus memahami bahwa mereka memiliki tanggungjawab untuk mengkomunikasikan masalah apapun yang tidak sesuai dengan pengendalian atau tindakan melawan hukum yang mereka temui kepada tingkat yang lebih tinggi dalam organisasi.

### 5. Auditor independen

Sebagai hasil dari audit laporan keuangan, seorang auditor eksternal mungkin akan menemukan kekurangan dalam pengendalian intern yang akan dikomunikasikan kepada manajemen, komite audit, atau dewan direksi, bersamaan dengan rekomendasi perbaikan.

## **2.1.6 Keterbatasan Pengendalian Intern**

Dalam pengendalian intern yang bagaimanapun baiknya, tidak dapat dianggap sepenuhnya efektif, karena selalu ada kemungkinan bahwa data yang dihasilkan tidak akurat akibat adanya beberapa keterbatasan yang melekat pada sistem tersebut.

Adapun keterbatasan pengendalian intern menurut Suryanto dalam Pratiwi (2017) yaitu sebagai berikut :

- 1. Kesalahan dalam pertimbangan**
- 2. Kemacetan**
- 3. Kolusi**
- 4. Pelanggaran oleh manajemen**
- 5. Biaya lawan manfaat<sup>10</sup>**

Adapun penjelasan dari keterbatasan pengendalian intern diatas yaitu :

1. Kesalahan dalam pertimbangan

Sering terjadi manajemen dan personil lainnya dapat melakukan kesalahan dalam pertimbangan yang kurang matang dalam keputusan bisnis yang diambil atau dalam melaksanakan tugas rutin karena tidak memadai informasi, keterbatasan waktu, atau tekanan lainnya.

---

<sup>10</sup> Putri Annisa Pratiwi, **Analisis Sistem Pengendalian Intern Dalam Meminimalisir Tingkat Kehilangan Persewaan Air Pada PDAM Tirta Bukit Sulap Lubuklinggau**, Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Palembang, 2017, hal.20

## 2. Kemacetan

Kemacetan dalam pengendalian yang telah berjalan bisa terjadi karena petugas salah mengerti dengan intruksi atau melakukan kesalahan karena kecerobohan, kebingungan atau kelelahan. Perpindahan personel sementara atau tetap atau perubahan sistem atau prosedur bisa juga mengakibatkan kemacetan.

## 3. Kolusi

Tindakan bersama beberapa individu untuk tujuan kejahatan disebut dengan kolusi (*collusion*). Kolusi dapat mengakibatkan bobolnya pengendalian intern yang dibangun untuk melindungi kekayaan entitas da tidak terungkapnya ketidakberesan atau tidak terdeteksinya kecurangan oleh pengenalian internal yang dirancang.

## 4. Pengabaian oleh manajemen

Manajemen dapat mengabaikan kebijakan atau prosedur yang telah ditetapkan untuk tujuan yang tidak sah seperti keuntungan pribadi manajer, penyajian kondisi keuangan yang berlebihan, atau kepatuhan semu.

## 5. Biaya lawan manfaat

Biaya yang diperlukan untuk mengoperasikan pengendalian internal tidak boleh melebihi manfaat yang diharapkan dari pengendalian intern tersebut. Karena pengukuran secara tepat baik biaya maupun manfaat baisanya tidak mungkin dilakukan, manajemen harus memperkirakan

dan mempertimbangkan secara kuantitatif dan kualitatif dalam mengevaluasi biaya dan manfaat suatu pengendalian internal.

Berdasarkan uraian di atas, pengendalian intern memiliki keterbatasan yang dapat menyebabkan tujuan perusahaan yang tidak tercapai. Dengan demikian berarti bahwa penerapan pengendalian intern bukan ditujukan untuk menghilangkan semua kecurangan dan kesalahan yang terjadi, melainkan untuk menguranginya seminimal mungkin, sehingga apabila terjadi kecurangan dan kesalahan dapat diketahui dan diatasi dengan cepat dan dengan baik.

## **2.2 Kredit**

### **2.2.1. Pengertian Kredit**

Secara umum kredit dapat diartikan sebagai suatu kegiatan peminjaman sejumlah modal oleh pemilik modal kepada pengguna modal, dalam hal ini terdapat unsur kepercayaan berupa keyakinan diberikan kepada penerima kredit bahwa pinjaman yang disepakati bersama dapat terlaksana dengan baik, selain unsur kepercayaan, ada unsur waktu yang merupakan suatu periodik yang memisahkan saat pemberian dan penerimaan kredit.

Kredit merupakan kegiatan yang terbesar dari perbankan karena kredit merupakan salah satu sumber pendapatan yaitu dengan bunga yang dapat diperoleh dari pinjaman yang diberikan oleh pihak Bank. Kredit dalam kegiatannya perbankan merupakan kegiatan usaha yang paling utama karena

pendapatan yang terbesar dari usaha bank yang berasal dari pendapatan usaha kredit yang diberikan yaitu berupa bunga.

Menurut Kasmir secara umum kredit dapat diartikan sebagai kepercayaan.

**“Dalam bahasa latin disebut *“credere”* yang berarti kepercayaan pihak bank (kreditor) kepada nasabah (debitur), dimana bank percaya nasabah pasti akan mengembalikan pinjamannya sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Dapat diartikan bahwa debitur memperoleh kepercayaan dari bank untuk memperoleh dana dan untuk menggunakan dana tersebut sebagaimana semestinya serta mampu untuk mengembalikan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak”.** <sup>11</sup>

Menurut Undang - Undang Pokok Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, kredit merupakan **“Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan dan kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.** <sup>12</sup>

Dari pengertian tersebut terkandung makna bahwa terdapat beberapa pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut, yaitu pemberi kepercayaan kepada satu pihak dan pihak lain yang memberikan kepercayaan.

---

<sup>11</sup> Kasmir, **Analisis Laporan Keuangan**, Cetakan Kedelapan: Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2008, hal.274

<sup>12</sup> Undang-Undang Pokok Perbankan No 10 Tahun 1998



## **2.2.2 Tujuan Kredit**

Suatu fasilitas kredit mempunyai beberapa tujuan yang hendak dicapai yang tentunya tergantung dari tujuan perusahaan tersebut. Tujuan dari pemberian kredit juga tidak akan terlepas dari misi perusahaan tersebut didirikan.

Adapun tujuan utama dari kredit menurut Kasmir dalam Nasution (2020) yaitu sebagai berikut :

- 1. Mencari Keuntungan**
- 2. Membantu Usaha Peminjaman**
- 3. Membantu Pemerintah<sup>13</sup>**

Dari uraian diatas dapat dijelaskan kredit memiliki fungsi yaitu :

1. Mencari Keuntungan  
yaitu bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit tersebut terutama dalam bentuk bunga yang diterima oleh Bank atau CU dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada peminjam. Keuntungan ini penting untuk kelangsungan hidup perusahaan.
2. Membantu Usaha Peminjaman  
Yaitu untuk membantu usaha peminjam yang memerlukan dana, baik dari dana investasi maupun dana untuk modal kerja agar dapat mengembangkan dan memperluas usahanya.

---

<sup>13</sup> Bimelda Afrian Nasution, **Op.Cit.**, hal.25

### 3. Membantu Pemerintah

Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik pula, karena akan meningkatkan pajak, membuka kesempatan kerja, meningkatkan jumlah barang dan jasa, serta menghemat dan meningkatkan devisa Negara.

### 2.2.3 Unsur-Unsur Kredit

Kredit merupakan sebuah solusi yang diberikan kepada masyarakat yang memiliki keterbatasan keuangan yang akan digunakan untuk keperluan dari kegiatan usahanya. Maka dari itu adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu kredit menurut Kasmir (2008) yaitu sebagai berikut :

1. Kepercayaan
2. Kesepakatan
3. Jangka waktu
4. Resiko
5. Balas jasa <sup>14</sup>

Dari uraian diatas dapat dijelaskan unsur-unsur pemberian kredit yaitu :

#### 1. Kepercayaan

Kepercayaan merupakan bank percaya nasabah akan mengembalikan kredit yang diberikan. Kepercayaan merupakan salah satu keyakinan bank bahwa kredit yang diberikan baik uang, barang, maupun jasa,

---

<sup>14</sup> Kasmir, **Op.Cit.**, hal.257

benar-benar akan diperoleh kembali diwaktu yang akan datang. Sebelum diberikannya oleh bank, sebaiknya dilakukan penelitian dan juga penyelidikan yang akan dilakukan untuk mengetahui kemauan dan juga kemampuan dalam membayar kredit atau pinjaman yang telah disalurkan.

## 2. Kesepakatan

Sebelum kredit diberikan, bank dengan nasabah terlebih dahulu menyepakati hal-hal yang menjadi kewajiban dan hak masing-masing pihak. Kemudian, juga disepakati sanksi-sanksi yang akan diberikan apabila masing-masing pihak melanggar kesepakatan yang telah dibuat. Kesepakatan merupakan persetujuan antara kedua belah pihak dalam suatu perjanjian. Dengan adanya kesepakatan antara sipemberi kredit dan penerima kredit akan dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak akan menandatangani hak dan juga kewajibannya masing-masing.

## 3. Jangka Waktu

Setiap kredit yang disalurkan pasti memiliki jangka waktu tertentu, artinya tidak ada kredit yang waktu pengembaliannya tidak terbatas. Setiap kredit yang akan diberikan pasti memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini yang akan menentukan masa atau waktu pengembalian atau kapan kredit tersebut akan berakhir (lunas) , misalnya satu tahun atau tiga tahun. Kemudian, juga termuat kapan nasabah harus membayar

kewajibannya (angsuran), yang biasanya dilakukan setiap bulan atau yang telah disepakati tersebut.

#### 4. Resiko (*Degree of Risk*)

Resiko akan terjadi akibat adanya kesenjangan waktu dari pemberian kredit tersebut. Asumsinya adalah semakin lama waktu pemberian kredit semakin tinggi pula tingkat resikonya. Resiko ini menjadi tanggungan bank, baik resiko yang disengaja. Dalam penyaluran dana pasti akan mengandung resiko bahwa dana itu tidak akan kembali. Kredit yang diberikan CU kepada para debitur akan mengandung resiko adanya kemungkinan debitur tidak dapat mengembalikan dana pinjaman tersebut. Resiko yang sering menjadi tanggungan, baik resiko yang disengaja oleh nasabah yang lalai, maupun oleh resiko yang tidak disengaja. Seperti bencana alam atau bangkrutnya usaha nasabah tanpa ada unsur-unsur kesengajaan lainnya.

#### 5. Balas Jasa

Merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa tersebut kita kenal dengan nama bunga. Balas jasa dalam bentuk bunga dan biaya administrasi kredit ini merupakan keuntungan dari Bank.

### **2.2.4 Jenis-Jenis Kredit**

Dalam praktiknya kredit yang ada dalam masyarakat terdiri dari berbagai jenis. Maka dalam sistem perkreditan, kredit tersebut dapat dikelompokkan kedalam beberapa bagian pengelompokannya, begitu pula dengan pemberian

kredit oleh bank kepada masyarakat. Pemberian kredit oleh bank dikelompokkan kedalam jenis yang masing-masing dilihat dari berbagai segi. Pembagian jenis ini ditunjukkan untuk mencapai tujuan tertentu untuk mengingat setiap jenis usaha memiliki berbagai karakteristik tertentu.

Adapun jenis-jenis kredit menurut Kasmir (2008) dapat kita lihat dari berbagai segi antara lain :

- 1. Dilihat dari Segi Kegunaannya**
  - a. Kredit Investasi**
  - b. Kredit Modal**
- 2. Dilihat dari Segi Tujuan Kredit**
  - a. Kredit Produktif**
  - b. Kredit Konsumtif**
  - c. Kredit Perdagangan**
- 3. Kredit dilihat dari Segi Jangka Waktu**
  - a. Kredit Jangka Pendek**
  - b. Kredit Jangka Menengah**
  - c. Kredit Jangka Panjang**
- 4. Kredit dilihat dari Segi Jaminan**
  - a. Kredit dengan Jaminan**
  - b. Kredit tanpa Jaminan**
- 5. Kredit dilihat dari Segi Sektor Usaha**
  - a. Kredit Pertanian**
  - b. Kredit Industri**

- c. Kredit Perumahan**
- d. Kredit Profesi**
- e. Kredit Pertambangan**
- f. Kredit Pendidikan<sup>15</sup>**

Adapun penjelasan dari uraian mengenai jenis-jenis kredit tersebut yaitu :

1. Kredit dilihat dari Segi Kegunaannya

a. Kredit investasi

Merupakan kredit yang diberikan untuk keperluan investasi, misalnya membangun pabrik, rumah, pembelian mesin-mesin, tanah, dan lainnya. Kredit investasi yang biasanya diberikan untuk waktu jangka panjang. Kredit investasi merupakan kredit jangka panjang yang biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek/pabrik baru untuk rehabilitasi.

b. Kredit modal

Merupakan kredit yang diberikan untuk keperluan modal kerja, misalnya untuk membeli bahan baku, pembayaran gaji, dan biaya lainnya. Kredit modal kerja diberikan dalam waktu yang relatif pendek dan satu kali siklus operasi. Dalam hal kredit modal kerja merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan dalam meningkatkan produksi dalam operasionalnya.

---

<sup>15</sup> **Ibid**, Hal. 277

## 2. Dilihat dari Segi Tujuan

### 1. Kredit Produktif

Merupakan kredit yang diberikan untuk menghasilkan sesuatu (proses produksi), baik barang maupun jasa, misalnya kredit diberikan untuk industry (pabrik), pertanian, peternakan, pabrik, perhotelan dan lainnya. Kredit produktif digunakan untuk meningkatkan usaha atau produksi maupun investasi. Dalam kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang ataupun jasa.

### 2. Kredit Konsumtif

Merupakan kredit yang diberikan untuk digunakan secara pribadi atau dipakai (dikonsumsi) sendiri, misalnya membeli rumah atau kendaraan yang akan digunakan untuk keperluan pribadi. Dalam hal kredit konsumtif, kredit yang digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi. Dalam kredit ini tidak ada penambahan barang atau jasa yang dihalikan, karena hanya digunakan oleh seseorang atau badan usaha.

### 3. Kredit Perdagangan

Merupakan kredit yang diberikan kepada para pedagang. Para pedagang membeli barang yang kemudian tersebut akan dijual kembali. Kredit perdagangan merupakan kredit yang diberikan kepada pedagang dan digunakan untuk membeli aktivitas perdagangannya seperti untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut.

### 3. Dilihat dari Segi Jangka Waktu

#### 1. Kredit jangka pendek

Merupakan kredit yang memiliki jangka waktu maksimal satu tahun atau kurang dari satu tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja.

#### 2. Kredit jangka menengah

Merupakan kredit yang memiliki jangka waktu satu sampai tiga tahun, namun dewasa ini banyak bank yang mengklasifikasikan menjadi kredit jangka panjang.

#### 3. Kredit jangka panjang

Merupakan kredit yang memiliki jangka waktu lebih dari satu atau tiga tahun. Artinya ada bank yang mengklasifikasikan yang lebih dari satu tahun menjadi kredit jangka panjang, namun ada pula yang mengklasifikasikan lebih dari tiga tahun menjadi jangka panjang.

### 4. Dilihat dari Segi Jaminan

#### 1. Kredit dengan jaminan

Merupakan kredit dengan syarat untuk memperolehnya harus memiliki jaminan tertentu, baik harta bergerak, tidak bergerak, atau jaminan lainnya. Dengan artinya setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi senilai dengan jaminan yang diberikan kepada calon debitur.

#### 2. Kredit tanpa jaminan

Merupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan apapun secara riil, namun sebenarnya meskipun tidak ada jaminan, dalam praktiknya ada



jaminan kemampuan membayar dari nasabah. Dalam hal ini kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha dan karakter serta loyalitas nama baik debitur selama ini.

#### 5. Dilihat dari Segi Sektor Usaha

##### 1. Kredit sektor pertanian

Merupakan kredit yang diberikan kepada para petani, baik tanaman jangka pendek yang kurang atau maksimal satu tahun maupun jangka panjang (lebih dari satu tahun atau tiga tahun sesuai dengan persyaratan bank).

##### 2. Kredit sektor industri

Merupakan kredit yang diberikan kepada industri, baik industri kecil, menengah, maupun besar.

##### 3. Kredit sektor perumahan

Merupakan kredit yang diberikan untuk kepemilikan rumah atau properti lainnya.

##### 4. Kredit sektor profesi

Merupakan kredit yang diberikan kepada professional seperti dokter, pengacara, dosen, dan lainnya.

##### 5. Kredit sektor pertambangan

Merupakan kredit yang diberikan untuk pengusaha yang bergerak dalam bidang pertambangan seperti, emas, batubara, timah, atau tambang lainnya.

## 6. Kredit sektor pendidikan

Merupakan kredit yang diberikan dunia pendidikan, seperti kredit mahasiswa.

### 2.2.5 Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit

Dalam pemberian kredit harus dilakukan analisis yang mendalam, sehingga nasabah dapat dikatakan layak untuk memperoleh kredit, dan fungsi dari jaminan kredit hanyalah untuk berjaga-jaga. Sebelum fasilitas kredit diberikan, CU harus merasa yakin dan percaya bahwa kredit yang diberikan benar-benar akan terjadi. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penelitian kredit sebelum kredit diberikan. Dengan dilakukan penilaian kriteria-kriteria aspek penelitiannya tetap sama. Begitu dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan sudah menjadi standar penilaian.

Menurut Kasmir dalam Hutauruk (2019) mengemukakan bahwa dalam melakukan penilaian kredit dengan secara umum dapat menggunakan prinsip-prinsip penilaian analisis dari 5C, dan prinsip 7P.

Adapun prinsip-prinsip penilaian analisis dengan 5C yaitu :

- a. ***Character***, yaitu untuk mengetahui sejauh mana tingkat kejujuran dan integritas, segala tekad yang baik untuk dapat memenuhi kewajiban-kewajiban dari calon debitur.
- b. ***Capacity***, yaitu untuk mempertimbangkan dengan cara menilai kemampuan debitur untuk sanggup melunasi kewajiban-kewajiban

dari segala kegiatan usaha yang dilakukan atau yang akan dibiayai dengan kredit tersebut.

- c. *Capital*, yaitu digunakan dengan mempertimbangkan jumlah dana atau modal sendiri yang dimiliki oleh calon debitur tersebut.
- d. *Collateral*, yaitu salah satu pertimbangan dengan menunjukkan besarnya aktivitas yang akan dilakukan sebagai jaminan atas kredit yang akan diterima.
- e. *Conditions*, yaitu salah satu pertimbangan yang dilakukan dengan melihat batasan-batasan atau hambatan-hambatan yang ada, yang tidak memungkinkan seseorang untuk melakukan usaha di suatu tempat.

Penilaian dalam suatu kredit dapat pula dilakukan dengan menggunakan analisis prinsip dengan 7P kredit dengan unsur penilaian sebagai berikut :

1. *Personality*, yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau dari tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya. *Personality* juga dapat mencakup dari sikap, emosi, tingkah laku dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah.
2. *Party* (golongan), yaitu untuk mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya. Sehingga nasabah dapat digolongkan ke dalam golongan tertentu dan akan mendapat fasilitas yang berbeda-beda dari bank.

3. *Purpose*, yaitu untuk mengetahui tujuan dari nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis dari kredit yang diinginkan oleh nasabah. Tujuan pengambilan kredit dapat bermacam-macam. Sebagai contoh apakah untuk modal kerja atau investasi, konsumtif atau produktif dan lain sebagainya.
4. *Prospect*, yaitu digunakan untuk menilai usaha nasabah dimasa yang akan mendatang menguntungkan atau tidak menguntungkan, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya.
5. *Payment*, yaitu salah satu ukuran bagaimana cara nasabah untuk mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit.
6. *Profitability*, yaitu digunakan untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. *Profitability* dapat diukur dari periode ke periode apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya.
7. *Protection*, yaitu untuk mengetahui bagaimana cara menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan atau barang atau jaminan asuransi.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Romaito Hutauruk, *Op.Cit.*, hal.28

## **2.3 Sistem Pengendalian Intern Pemberian Kredit**

### **2.3.1 Pengertian Sistem Pengendalian Intern Pemberian Kredit**

Sistem pengendalian intern pemberian kredit merupakan organisasi formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan manajemen guna memudahkan pengelolaan koperasi. Sistem pengendalian intern merupakan kegiatan yang sangat penting dalam mencapai tujuan suatu usaha.

Sistem pengendalian intern pemberian kredit didefinisikan sebagai suatu proses yang dipengaruhi oleh sumber daya manusia dan sistem teknologi informasi, maka dirancang untuk membantu organisasi mencapai suatu tujuan atau objektif tertentu. Sistem pengendalian intern merupakan suatu cara mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi berperan penting untuk mencegah dan mendeteksi penggelapan (*fraud*) dan melindungi sumber daya organisasi baik yang berwujud (*seperti mesin dan lahan*) maupun tidak (*reputasi dan kekayaan intelektual seperti merek dagang*).

Menurut Mulyono dalam Bustami (2018) mengatakan bahwa:

**“Sistem pengendalian intern pemberian kredit adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen dan personel lain, dalam usahanya untuk menjaga kekayaan bank dalam bentuk perkreditan yang efektif dan efisien, menghindarkan terjadinya penyimpangan dengan cara mendorong dipatuhinya**

**kebijakan-kebijakan perkreditan yang telah ditetapkan, serta penyusunan laporan keuangan yang andal”.**<sup>17</sup>

### **2.3.2 Sistem Pengendalian intern Pemberian Kredit**

Sistem pengendalian intern pemberian kredit bertujuan untuk memberikan kemudahan dalam proses pengajuan kredit bagi para nasabah, serta memberikan pedoman yang jelas atas syarat-syarat pengajuan kredit tersebut. Sistem pengendalian intern pemberian kredit merupakan bagian yang dibentuk dalam memberikan kemungkinan tercapainya pengendalian intern yang cukup memadai sehingga mampu menciptakan data akuntansi yang dapat dipercaya dan dapat diandalkan.

Pengendalian intern pemberian kredit bagi suatu Bank sangat penting untuk mengamankan kekayaan bank dan yang biasa dilaksanakan menurut Azhar dan Pradana dalam Fatwandini (2015) sebagai berikut :

- a. Pemisahan Fungsi, adanya pemisahan dengan fungsi operasi, penyimpanan data akuntansi yang diselenggarakan dapat mencerminkan tanggungjawab yang sesungguhnya.**
- b. Perlu disusun pencatatan dan pelaporan harian yang baik dan tepat waktu mengenai posisi dana-dana dan kredit.**
- c. Perlunya penyusunan ikhtisar mutasi keuangan bulanan.**

---

<sup>17</sup> Bustami, **Analisis Sistem Pengendalian Intern Penyaluran Kredit Pada PD.BPR Rokan Hulu**, Karya Ilmiah Fakultas Ekonomi Universitas Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu 2018

- d. Perlu pelaksanaan inventarisasi fisik dalam waktu yang pendek berikut pengawasan administrative.**
- e. Perlu diciptakan peraturan-peraturan intern yang akan menjamin keamanan atau kelayakan Bank, baik bersifat preventif maupun represif.**
- f. Penandatanganan surat-surat berharga oleh dua orang pejabat dan lain-lain.**
- g. Perlu diciptakan “parallel administrasi” atau “pembukuan ganda”**
- h. Perlu diciptakan “administrasi bayangan” untuk piutang kredit.<sup>18</sup>**

Adapun unsur-unsur pokok dan struktur pokok dari pengendalian intern menurut Azhar dan Pradana adalah dalam Fatwandini (2015) sebagai berikut :

- 1. Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas,**
- 2. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap asset, utang, pendapatan, dan beban.**
- 3. Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi.**
- 4. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya.<sup>19</sup>**

---

<sup>18</sup> Ainur Zurlis Fatwandini, *Analisis Pengendalian Intern Pemberian Kredit*, Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Jember 2015, Hal.55

<sup>19</sup> Ainur Zurlis Fatwandini, *Op.Cit.*,

Adapun penjelasan mengenai unsur-unsur pokok dan struktur pokok dari pengendalian intern diatas yaitu :

1. Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas. Struktur organisasi merupakan kerangka (framework) pembagian tanggung jawab fungsional kepada unit-unit organisasi yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pokok perusahaan. Pembagian tanggung jawab fungsional dalam organisasi ini didasarkan pada prinsip-prinsip berikut ini :
  - a. Harus dipisahkan fungsi-fungsi operasi dan penyimpanan dari fungsi akuntansi. Fungsi operasi adalah fungsi yang memiliki wewenang melaksanakan suatu kegiatan (misalnya melakukan pembelian). Setiap kegiatan dalam perusahaan memerlukan otoritas dari manajer fungsi yang memiliki wewenang untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Fungsi penyimpanan adalah fungsi yang memiliki wewenang untuk menyimpan aktiva perusahaan. Fungsi akuntansi adalah fungsi yang memiliki wewenang untuk mencatat peristiwa perusahaan.
  - b. Suatu fungsi tidak boleh diberi tanggung jawab penuh untuk melaksanakan semua tahap suatu transaksi. Dengan adanya pemisahan tentang tanggungjawab fungsional dilakukan untuk membagi tahap transaksi dan tanggungjawabnya diberikan kepada membagi tahap transaksi dan tanggungjawabnya diberikan kepada



manajer berbagai unit organisasi yang dibentuk sehingga transaksi tersebut terselesaikan oleh suatu unit organisasi saja.

2. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap asset, utang, pendapatan, dan beban. Dalam organisasi setiap transaksi hanya terjadi atas dasar otoritas dari pejabat yang wewenang untuk menyetujui terjadinya transaksi tersebut. Oleh karena itu dalam organisasi harus dibuat sistem yang mengatur pembagian wewenang untuk otoritas atas terlaksananya setiap transaksi dalam organisasi.
3. Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi. Pembagian tanggung jawab fungsional dalam sistem wewenang sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang telah ditetapkan tidak akan terlaksanakan dengan baik jika tidak diciptakan cara-cara untuk menjamin praktik yang sehat dalam pelaksanaannya.
4. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya. Unsur mutu karyawan merupakan unsur sistem pengendalian intern yang penting. Karyawan yang jujur dan ahli dalam bidang yang menjadi tanggung jawabnya akan dapat melaksanakan pekerjaannya dengan efektif dan efisien meskipun hanya sedikit unsur sistem pengendalian intern yang mendukungnya.

Adapun sistem pemberian kredit bertujuan untuk memberikan kemudahan dalam proses pengajuan kredit kepada para nasabah, dan dapat memberikan pedoman yang jelas dengan syarat-syarat pengajuan kredit tersebut.

Adapun tugas dan tanggung jawab dalam bagian organisasi menurut Mudrajat Koncoro dalam Dwi (2014) yaitu sebagai berikut :

1. **Seksi Administrasi Kredit**
2. **Seksi Analisis Kredit**
3. **Seksi Monitoring Kredit**
4. **Seksi Asuransi**
5. **Seksi Penagihan**
6. **Bagian Pelayanan Dana dan Jasa**
7. **Bagian Pelayanan Pinjaman/Kredit**
8. **Bagian Kasir atau Teller**
9. **Bagian Akuntansi<sup>20</sup>**

Adapun penjelasan dari bagian tugas dan tanggung jawab dalam bagian organisasi yaitu :

1. Seksi Administrasi Kredit. Tugas dari seksi administrasi kredit adalah mengadministrasikan dokumen-dokumen pinjaman mulai dari proses permohonan kredit sampai kredit tersebut lunas.
2. Seksi Analisis Kredit. Tugas utama dari seksi analisis kredit ini adalah melakukan analisis atas permohonan kredit yang diajukan oleh calon nasabah berdasarkan informasi-informasi yang berkaitan dengan usaha nasabah baik yang diperoleh secara langsung maupun tidak langsung

---

<sup>20</sup> Clara Niken Dwi, **Analisis Pengendalian Intern Pada Sistem Pemberian Kredit**, Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma 2014, Hal 21

melalui berbagai instansi yang berkaitan dengan usaha calon nasabah dan status hukumnya.

3. Seksi Monitoring Kredit. Tujuan utamanya adalah untuk memonitor perkembangan usaha dan ketetapan membayar bunga dan angsuran pokok kredit.
4. Seksi Asuransi. Tugas utamanya adalah untuk melakukan administrasi kredit yang diasuransikan baik asuransi jiwa, debitemnya, maupun asuransi kreditya sendiri.
5. Seksi Penagihan Tunggakan. Tugass utamanya adalah melakukan administrasi terhadap kredit yang sudah macet.
6. Bagian Pelayanan Dana dan Jasa. Tugas utamanya adalah memberikan pelayanan kepada nasabah atau calon nasabah yang akan menggunakan produk dan jasa dengan memberikan informasi yang diperlukan oleh nasabah berkaitan dengan produk dan jasa yang akan dipergunakan.
7. Bagian Pelayanan Pinjaman/Kredit. Tugas utamanya adalah memberikan pelayanan dalam hal pencairan kredit, angsuran kredit, perhitungan bunga dan sebagainya.
8. Bagian Kasir atau Teller. Tugas utamanya adalah memberikan pelayanan kepada nasabah dalam hal penarikan maupun penyeteroran uang.
9. Bagian Akuntansi. Tugas-tugas dari bagian akuntansi yaitu :

1. Mencetak laporan-laporan keuangan, antara lain laba dan laba rugi.
2. Melakukan verifikasi atas transaksi pembukuan berdasarkan bukti-bukti pembukuan yang ada.
3. Memastikan bahwa semua kegiatan bagian operasional telah dibukukan pada hari tersebut.

Dengan adanya tugas dan tanggungjawab yang diberlakukan dalam lingkungan organisasi tersebut, maka dalam hal pemberian kredit diperlukan dokumen-dokumen yang diperlukan dalam pemberian kredit yaitu :

- a. Dokumen permohonan kredit, merupakan formulir yang harus diisi oleh nasabah apabila akan mengajukan kredit yang biasanya berisikan alasan mengapa nasabah akan mengajukan kredit. Adapun dokumen yang berisikan di dalamnya berupa :
  - Nama pemohon
  - NIK
  - Tanggal Lahir
  - Alamat
  - Pekerjaan
  - Memohon Pinjaman Sebesar
  - Tujuan Pinjaman
  - Jangka Pembayaran Angsuran Bulanan

- b. Dokumen analisis kredit, merupakan dokumen untuk melakukan proses analisis kredit yang biasanya dapat dilakukan melalui proses survey kepada nasabah.
- c. Dokumen putusan kredit, merupakan hasil dari analisa kredit yang berisi keputusan apakah dokumen permohonan tersebut akan diterima atau ditolaknya suatu pengajuan kredit permohonan tersebut.
- d. Dokumen jaminan kredit, merupakan barang jaminan yang digunakan oleh nasabah untuk mengajukan permohonan kredit. Jaminan dapat berupa Saham, Surat Tanah, dan BPKB. Dengan demikian dapat mempertimbangkan proses pengajuan kredit.
- e. Dokumen pengikat jaminan kredit, merupakan sebuah surat yang dibuat untuk dijadikan sebagai bukti atas barang jaminan yang dijamin oleh nasabah dalam pengajuan kredit.
- f. Dokumen pencairan kredit, merupakan surat yang berisikan keterangan bahwa pengajuan kredit telah disetujui dan akan dicairkan. Jika pengajuan kredit dilakukan dibawah saham maka akan dicairkan dihari yang sama, tetapi jika diatas saham maka pencairan tersebut akan dicairkan seminggu setelah melakukan permohonan.
- g. Dokumen perjanjian kredit, dokumen ini dibuat setelah ada persetujuan pencairan kredit tersebut. Dokumen ini mengatur mengenai pasal-pasal antara nasabah dengan pihak Koperasi dan

nasabah berkewajiban membayar kembali pinjaman berdasarkan syarat dan kondisi yang telah disepakai oleh kedua belah pihak. Dan melakukan pembayaran angsuran secara bulanan ditanggal yang sama.

Dalam sistem pemberian kredit terdapat prosedur-prosedur yang dapat dilakukan, baik yang dilakukan oleh nasabah maupun yang dilakukan oleh pihak CU. Dalam proses pemberian kredit kepada para nasabah, pihak CU atau pihak perusahaan harus membuat ketentuan-ketentuan yang berlaku, syarat ataupun petunjuk yang harus dilakukan sejak dimulai atau diajukannya permohonan nasabah hingga pada saat pelunasan kredit tersebut. Adapun tujuan dari prosedur pemberian kredit yaitu untuk memastikan tentang kelayakan suatu kredit ditolak atau diterima.

Adapun tahapan-tahapan prosedur dalam pemberian kredit menurut Mudrajat Koncoro dalam Dwi (2014) yaitu sebagai berikut :

- a. Tahap kegiatan Prakara dan Permohonan Kredit**
- b. Tahap analisis dan evaluasi kredit**
- c. Tahap pemberian rekomendasi kredit**
- d. Tahap pemberian putusan kredit<sup>21</sup>**

Adapun penjelasan tahapan-tahapan prosedur pemberian kredit diatas yaitu :

- a. Tahap kegiatan prakara dan permohonan kredit

Permohonan kredit harus diajukan secara tertulis dan menggunakan format yang telah ditentukan dengan menggunakan dokumen

---

<sup>21</sup> Clara Niken Dwi, **Op.Cit.**, hal.24

permohonan dari lembaga pemberi kredit atau Kopdit. Atas permohonan tersebut, lembaga pemberi kredit akan melakukan penelitian apakah permohonan tersebut dapat diterima atau ditolak.

b. Tahap analisis dan evaluasi kredit

Analisis dan evaluasi kredit dituangkan dalam format yang telah ditetapkan oleh perusahaan tersebut. Dalam analisis tersebut sekurang-kurangnya mencakup informasi sebagai berikut:

1. Identitas pemohon
2. Tujuan permohonan kredit
3. Jumlah pinjaman kredit
4. Jangka waktu pembayaran angsuran pinjaman

c. Tahap pemberian rekomendasi kredit

Rekomendasi kredit dibuat oleh pejabat perekonomian kredit berdasarkan analisis atau evaluasi yang dibuat oleh penganalisis kredit. Rekomendasi kredit merupakan suatu kesimpulan dari analisis dan evaluasi atas proposal kredit yang disajikan oleh pejabat analisis kredit. Apabila perekomendasi telah teras yakin atas rekomendasinya serta kelengkapan dokumennya, selanjutnya menyerahkan dokumen kredit tersebut kepada pejabat pemutus dan mempertahankan pendapatnya bila diperlukan.

d. Tahap pemberian putusan kredit

Pemberian keputusan kredit harus dilakukan oleh pejabat yang berwenang dan harus dilakukan secara tertulis dan dibuktikan dengan memberikan tandatangan pada formulir putusan kredit. Apabila putusan kredit telah diberikan, selanjutnya dokumen kredit diserahkan kepada administrasi kredit untuk dipersiapkan dokumen lainnya, yaitu :

1. Surat penawaran putusan kredit, surat ini memuat struktur dan tipe kredit serta syarat-syarat dan ketentuan kredit yang harus dipenuhi oleh nasabah. Dalam surat penawaran ini harus dicantumkan kapan batas waktu kepada nasabah untuk memberikan persetujuan atas penolakan.
2. Dokumen perjanjian kredit, perjanjian kredit memuat unsur-unsur perjanjian yang dikehendaki seperti yang tertuang dalam putusan kredit dan memuat agunan yang diberikan dan pengikatnya.
3. Dokumen untuk pencairan, dokumen pencairan kredit merupakan pengikat nasabah dengan bank yang mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak.



## 2.4 Koperasi

Dalam Undang-Undang No. 25 tahun 1992 bahwa Koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi, dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan.

Sedangkan menurut Undang-Undang No. 12 tahun 2012 koperasi merupakan badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.

Adapun prinsip-prinsip dasar koperasi yaitu :

Keanggotaan koperasi sifatnya terbuka dan sukarela

Proses pengelolaannya dilakukan secara demokratis

Pemberian balsas jasa kepada anggotanya disesuaikan dengan modal anggota tersebut

Pembagian sisa hasil usaha (SHU) mengendapkan rasa keadilan sesuai dengan kinerja dari masing-masing anggota

Koperasi merupakan badan usaha swadaya yang otonom dan independen

Koperasi memperkuat gerakan dengan bekerja sama.

## 2.5 Cedit Union

### 2.5.1 Pengertian Credit Union

Menurut literature, *Credit Union (CU)* memiliki beberapa pengertian, yaitu :

Pertama, CU merupakan koperasi keuangan yang dijalankan secara demokratis dan *profit sharing* (bagi hasil), menawarkan berbagai produk simpanan dan peminjaman berbunga rendah kepada para anggotanya.

Kedua, *world council of credit union (WOCCU)* mendefenisikan bahwa CU sebagai “*not-for-profit cooperative institutions*” (lembaga koperasi yang bukan untuk tujuan mencari keuntungan).

Ketiga, CU merupakan koperasi keuangan yang didirikan dari, oleh, dan untuk anggota dimana para anggota adalah penabung, pinjaman, dan sekaligus sebagai pemegang saham.

Credit union atau sering disebut dengan CU, merupakan salah satu tiang atau tombak perekonomian dalam rangka pengentasan kemiskinan, sebab segala kegiatan yang terdapat dalam CU tersebut adalah bagaimana cara meningkatkan kesejahteraan anggota sehingga model CU sangat cocok untuk dikembangkan.

Credit Union (CU) berasal dari bahasa Latin “*credere*” yang memiliki arti percaya dan “*union*” yang memiliki arti kumpulan. *Credit Union* dapat diartikan sebagai sekumpulan orang-orang yang saling percaya dalam suatu ikatan pemersatu dan sepakat untuk membantu sesama anggotanya untuk menolong dirinya sendiri dengan cara menabung dan meminjamkan hasil tabungannya

kepada sesama anggotanya atas dasar saling percaya untuk mencapai kesejahteraan bersama anggotanya.

## **2.5.2 Prinsip-Prinsip Credit Union**

Menurut *world council of credit union* (WOCCU) mengeluarkan *Opening Principles* yang harus diterapkn secara konsisten oleh entitas bersama CU. Prinsip-prinsip CU (*Operating Principle of Credit Union*) yaitu sebagai berikut (Karlana, 2012 : 30)

### **a. Struktur yang Demokratis**

#### **1. Keanggotaan terbukti dan sukarela**

Keanggotaan dalam CU merupakan terbuka dan sukarela terhadap semua orang yang berada didalam ikatan pemersatu (*common bond*) yang dapat memanfaatkan pelayanan CU, dan bersedia memikul tanggungjawab bersama.

#### **2. Pengawasan demokratis**

Para anggota CU memiliki hak yang sama untuk memilih dan dapat berpartisipasi di dalam pengambilan keputusan yang dapat mempengaruhi kemajuan dalam CU tersebut, tanpa memperhatikan jumlah simpanan maupun tabungan atau volume bisnis. Voting di dalam organisasi atau asosiasi pendukung CU haruslah proporsional atau representative, sesuai dengan prinsip-prinsip yang demokratis. Dalam kerangka hokum dan peraturan mengenai perundangan, CU

dapat diakui sebagai sebuah koperasi yang melayani anggota dan diawasi oleh para anggota.

3. Tidak diskriminatif

CU tidak diskriminatif terhadap semua latar belakang anggota, termasuk terhadap suku, orientasi, kebangsaan, seks, agama, dan politik.

b. Pelayanan kepada Anggota

1. Distribusi kepada anggota

Untuk mendorong pola hidup sehat dengan cara menabung dan kemudian dengan menyediakan pelayanan pinjaman dan pelayanan lainnya, balas jasa simpanan yang menarik harus bersedia sesuai dengan kemampuan CU. Surplus yang diperoleh dari kegiatan usaha CU setelah menutupi biaya modal, modal operasional, provisi pinjaman lalai, dan untuk memenuhi ketentuan dan persyaratan dana cadangan, menjadi milik anggota dan bermanfaat bagi anggota sehingga tak seorang pun anggota atau kelompok tersebut merasa dirugikan.

2. Membangun stabilitas keuangan

Perhatian utama dari CU yaitu untuk membangun kekuatan keuangan yang meliputi tersedianya dana cadangan yang memadai, dan pengendalian internal yang akan memastikan pelayanan kepada anggota berkelanjutan.

### 3. Pelayanan kepada anggota

Pelayanan yang diarahkan oleh CU untuk meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi semua anggotanya.

## c. Tujuan Sosial

### 1. Pendidikan yang terus menerus

CU secara aktif melaksanakan pendidikan kepada para anggota, pengurus, pengawas, komite, dan staff, serta kepada masyarakat, berdasarkan prinsip-prinsip menolong diri sendiri dalam kebersamaan, demokrasi, sosial dan ekonomi.

### 2. Kerja sama antarkoperasi (CU)

Sesuai dengan filosofi dan praktik pengaturan koperasi, CU dalam kapasitasnya secara aktif bekerjasama dengan CU lain, koperasi, berbagai lembaga pada tingkat local, nasional, dan internasional agar mampu memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh anggota dan seluruh masyarakat.

### 3. Tanggungjawab sosial

Selain melanjutkan cita-cita dan keyakinan para pionir atau pelopor koperasi, CU berusaha untuk mewujudkan pembangunan manusia dan pembangunan sosial. Cita-cita CU merupakan untuk memperluas pelayanan kepada semua orang yang membutuhkan dan dapat menggunakannya. Setiap orang, baik yang sudah menjadi anggota maupun calon anggota, dapat menjadi bagian dari CU sesuai dengan minat dan kepentingannya. Keputusan yang akan diambil dengan

memperhatikan dengan sungguh-sungguh kepentingan masyarakat luas  
 tempat CU dan para anggotanya berada.

## 2.6 Penelitian Terdahulu

Tabel

Penelitian Terdahulu (Sumber Romaito Hutauruk 2019)

No	Judul Penelitian	Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	Metode Analisis Penelitian	Hasil Penelitian
1	Analisis Pengendalian Intern Terhadap Sistem Pemberian Kredit Modal Kerja (Studi Kasus pada PT.Bank Perkreditan Rakyat UMKM Jawa Timur Cabang Pacitan)	Putra, <i>et.al</i> (2006)	Metode Deskriptif dengan Pendekatan Kualitatif	Pelaksanaan sistem dan prosedur dapat dinilai dari empat unsur pengendalian intern dan dilaksanakan dengan cukup baik namun masih terdapat beberapa

				kelemahan yaitu masih adanya perangkapan tugas yang dapat menyebabkan penyelewengan dan belum ada petugas penilaian jaminan.
2	Analisis Kelayakan Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Kantor Cabang Bsd City	Putri (2017)	Metode Deskriptif dengan Pendekatan Kualitatif	Pada implementasinya lebih mengedepankan tiga aspek yaitu karakter, kapasitas dan jaminan/agunan. Akan tetapi untuk pembiayaan KUR Mikro di

				<p>Bank BRI</p> <p>Syariah bank lebih terfokus pada aspek kareakter dan kapasitas karena dalam produk ii agunan tidak diwajibkan boleh saja memberikan agunan tapi tidak terikat dan tidak mengcover seluruh jumlah pembiayaan.</p>
3	<p>Analisis Sistem Pengendalian Intern Dalam Pemberian Kredit Cepat Aman Pada PT Pegadaian</p>	<p>Nurjannah, <i>et.al</i> (2015)</p>	<p>Metode Deskriptif dengan Pendekatan Kualitatif</p>	<p>Hasil penelitian yang diperoleh adalah pemaparan evaluasi terhadap</p>



	(Persero) Cabang Pontianak			struktur organisasi meliputi pembagian wewenang dan tugas masing-masing bagian yang memisahkan fungsi operasi, akuntansi dan penyimpanan; evaluasi terhadap prosedur pemberian dan pelunasan KCA dari PT Pegadaian Cabang Pontianak atau UPC yang terkait prosedur
--	-------------------------------	--	--	--

				dan wewenang yang dilakukan serta <i>flowchart</i> pemberian dan pelunasan KCA.
4	Prosedur Sistem Pengendalian Internal Pada Prosedur Pemberian Kredit Angsuran Sistem Fidusia Studi kasus; PT. Pegadaian Cabang Depok Semarang	Nurjannah <i>et.al</i> (2015)	Metode Deskriptif dengan Pendekatan Kualitatif	Sistem pemberian kredit yang dilaksanakan oleh PT. Pegadaian Cabang Depok Semarang tersebut telah didukung oleh penerapan pengendalian interanal cukup efektif, dan telah memenuhi sistem pengendalian

				<p>internal yaitu ada dan dilaksanakannya prosedur pemberian kredit, lingkungan penegndalian, penafsiran resiko lebih ditingkatkan, aktivitas pengendalian dan pemantauan serta kurangnya otorisasi tiap devisi yang belum lengkap.</p>
5	<p>Analisis Sistem Pengendalian Intern Pemberian Kredit Pada Badan Usaha Milik Desa</p>	Pirdaus (2015)	<p>Metode Deskriptif dengan Pendekatan Kualitatif</p>	<p>Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa proses</p>

	<p>(BUMDes Bina Usaha Desa Kepenuhan Barat)</p>		<p>persetujuan kredit didominasi direktur dalam menentukan calon nasabah yang berhak memperoleh pinjaman, penentuan jumlah <i>plafond</i> kredit yang disetujui oleh pihak BUMDes Bina Usaha disesuaikan dengan jaminan calon nasabah, dan proses pencairan pinjaman menggunakan bukti transaksi</p>
--	---	--	--

				berupa kuintansi disertai dengan Surat Perjanjian Pemberian Kredit (SP2K).
--	--	--	--	--

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Objek Penelitian**

Objek penelitian merupakan salah satu variabel yang menjadi perhatian khusus dalam suatu penelitian dan yang akan menjadi salah satu pusat perhatian dan sasaran dalam suatu penelitian. Sehingga dapat disimpulkan yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah Analisis Sistem Pengendalian Intern Pemberian Kredit Pada Koperasi Kredit CU Sepakat Sibolga yang beralamat di Jl. Sisingamangaraja No. 486, Kota Sibolga, Sibolga Selatan, Sumatera Utara.

#### **3.2 Jenis Penelitian**

Dalam penyusunan proposal ini, penulis menggunakan jenis penelitian dalam bentuk deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan jenis penelitian yang mempunyai tujuan dengan menggambarkan karakteristik dari suatu variabel, kelompok atau gejala sosial yang sering terjadi dimasyarakat. Penelitian deskriptif dapat dilakukan dengan analisis dengan menggunakan logika yang berdasarkan fakta yang ada untuk dapat dianalisis berdasarkan literature-literatur yang dapat diartikan menjadi sebuah kesimpulan dengan menggunakan metode yang diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai Analisis Sistem Pengendalian Intern Pemberian Kredit Pada Koperasi CU Sepakat Sibolga.

### 3.3 Jenis dan Sumber Data Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan data kualitatif, yaitu data yang terdiri dari segi non angka atau bersifat deskriptif berupa kata-kata atau kalimat. Jika dilihat dari sumber datanya, maka dalam pengumpulan data yang akan digunakan didalam penelitian ini yaitu menggunakan dua jenis data yaitu :

#### 1. Data Primer

Menurut Purba dan Simanjuntak :

**Bahwa data Primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber pertama. Data dikumpulkan dengan cara mencari informasi secara langsung dilapangan. Salah satu ciri khas data primer adalah data tersebut dikumpulkan sendiri dan digunakan sendiri oleh peneliti.**<sup>22</sup>

Data primer secara langsung diperoleh oleh peneliti ini adalah dengan melalui teknik wawancara mengenai data yang dibutuhkan dan informasi yang valid dan akurat terhadap informan-informan yang dijadikan sebagai sumber informasi yaitu Koperasi Kredit CU Sepakat Sibolga.

#### 2. Data Sekunder

Menurut Sijabat mengemukakan bahwa : **“Data sekunder merupakan bukti, catatan, atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumentasi) yang dipublikasi dan yang tidak dipublikasi”.**<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Elvis F. Purba dan Parulian Simanjuntak, **Metode Penleitian**, Edisi Pertama, Cetakan Pertama: Universitas HKBP Nommensen Medan, 2011, hal.106

<sup>23</sup> Jadongan Sijabat, **Metedologi Penelitian Akuntansi**, Universitas HKBP Nommensen Medan, Medan, 2014, hal.85

Sedangkan menurut Ananta Wikrama Tungga “**Data sekunder merupakan informasi yang dikumpulkan dari sumber yang telah ada**”.<sup>24</sup> Dalam penelitian ini maka sumber langsung dapat diperoleh berupa data dokumentasi dan arsip-arsip resmi. Data sekunder dapat berupa struktur organisasi perusahaan, sejarah singkat berdirinya perusahaan, bukti surat permohonan pinjaman, data pemberian kredit modal kerja dan dokumen-dokumen lainnya terkait dengan pemberian kredit pada Koperasi CU Sepakat Sibolga.

### **3.4 Metode Pengumpulan Data**

Metode penelitian merupakan salah satu cara yang ditempuh dalam pengumpulan data informasi yang berguna untuk dikembangkan guna mencapai suatu tujuan.. Pada dasarnya dalam suatu penelitian ilmiah, metode pengumpulan data merupakan salah satu usaha dasar dalam mengumpulkan data yang dilakukan secara sistematis, dengan prosedur yang terstandar.

Adapun tujuan utama dari pengumpulan data yaitu untuk memperoleh bahan-bahan yang relevan, akurat, dan terpercaya. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan beberapa cara yaitu sebagai berikut :

#### **1. Penelitian Kepustakaan**

Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang dilakukan berdasarkan karya-karya ilmiah dan buku-buku literature yang berkaitan dengan

---

<sup>24</sup> Ananta Wikrama Tungga, dkk, **Metode Penelitian Bisnis**, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2014, hal.68



pembahasan ini dan dimaksudkan untuk mendapatkan landasan teori yang erat hubungannya.

## 2. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan yaitu metode yang digunakan untuk pengumpulan data yang akan dilakukan dilokasi atau objek penelitian secara langsung maupun ditemapt lain yan ada kaitannya dengan pokok pembahasan.

Penelitian lapangan dilakukan dengan cara sebagai berikut :

### 1. Wawancara

Menurut Nawangsari dan Putra (2016) bahwa :

**“Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara melakukan Tanya jawab seputar objek penelitian dengan narasumber atau bagian yang terkait dalam proses pemberian kredit.”**<sup>25</sup>

Teknik pengumpulan data yang dilakukan secara langsung untuk dapat memperoleh informasi dari sumber yang bersangkutan atau dari bagian yang berwenang yang berhubungan dengan tujuan pennelitian, untuk mengetahui :

- a. Gambaran umum kopdit CU Sepakat Sibolga
- b. Sistem pengendalian perusahaan, khususnya pada sistem pemberian kredit pada kopdit CU Sepakat Sibolga

---

<sup>25</sup> Yesti Nawangsari dan Iwan Setya Putra, **Analisis Sistem Pengendalian Intern Pemberian Kredit Dalam Menurunkan Tingkat Kredit Macet Pada Koperasi Simpan Pinjam “Kharisma Mitra Karya”**, Jurnal Komplikasi Ilmu Ekonomi STIE Kesuma Negara Blitar Vol.8, No.1, 2016, hal.72

- c. Prosedur mengenai pemberian kredit pada kopdit CU Sepakat Sibolga
- d. Dokumen-dokmen yang digunakan oleh kopdit CU Sepakat Sibolga

## 2. Dokumentasi

Menurut Putra (2016) bahwa :

**“Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan memeriksa, melihat, data-data yang disajikan oleh pihak perusahaan yang berhubungan dengan topic penelitian yang dibahas”.**<sup>26</sup>

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dapat dilihat dengan melihat arsip, berkas dan catatan-catatan yang ada di CU.

Dokumentasi yang dibutuhkan untuk memperoleh informasi data mengenai prosedur dan juga dokumen permohonan kredit, prosedur dan dokumen pencarian kredit, dan dokumen administrasi kredit.

### 3.5 Teknik Analisis Data Metode Deskriptif

#### a. Metode Deskriptif

Metode yang digunakan untuk menganalisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode Deskriptif.

---

<sup>26</sup> **Loc. cit**

Menurut Mukhtar dalam Ainun (2020) bahwa “**Metode Deskriptif kualitatif adalah suatu metode yang dilakukan untuk sebuah penelitian atau observasi guna menciptakan sebuah pengetahuan dan teori untuk suatu penelitian**”.<sup>27</sup>

Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti suatu objek, dimana data yang dikumpulkan disusun, diinterpretasikan dan dianalisa sehingga memberikan keterangan yang lengkap bagi pemecahan permasalahan yang dihadapi. Tujuan penelitian ini untuk membuat deskripsi, gambaran secara sistematis, aktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Metode ini menggambarkan bagaimana pengendalian intern pemberian kredit pada Koperasi CU Sepakat Sibolga.

#### **b. Metode Komperatif**

Metode analisis komperatif, merupakan kesimpulan dari fakta yang diamati dan telah di uji kebenarannya dengan membandingkan anatara teori yang merupakan kebenaran umum dengan data lapangan yang dimiliki. Metode komperatif merupakan suatu metode yang memandingkan unsur-unsur pengendalian intern pemberian kredit secara teori yang berlaku dengan praktek yang diterapkan di Koperasi CU Sepakat Sibolga sehingga dapat diketahui gambaran penyimpangan dan selanjutnya akan membuat kesimpulan yang sebenarnya dari masalah yang diteliti dengan langkah-langkah sebagai berikut :

---

<sup>27</sup> Ainun, et. al., **Analisis Kesalahan Berbahasa Mahasiswa IKIP Siliwangi Dalam Literasi Media**, Bandung, 2020, hal.10

1. Memperoleh gambaran umum mengenai situasi dari tempat penelitian berdasarkan bahan yang sudah didapat dari wawancara dan dokumen yang ada serta mengadakan pendekatan dengan responden.
2. Mengumpulkan data yang berkaitan dengan unsur-unsur pengendalian intern pemberian kredit selama ini yang telah diterapkan.
3. Melakukan tahap analisis pengendalian intern pemberian kredit yang sudah ada di Koperasi CU Sepakat Sibolga khususnya yang berkaitan dengan unsur-unsur pengendalian intern pemberian kredit yang berdasarkan data-data yang telah diperoleh. Sistem pengendalian intern akan dapat dianalisis setiap unsur pengendaliannya yang meliputi sebagai berikut :
  - a. Struktur organisasi yang memisahkan tanggungjawab fungsional secara tegas.
  - b. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan dan biaya.
  - c. Praktek yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi.
  - d. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggungjawab.
4. Peneliti menarik kesimpulan atas uraian yang telah dilakukan.
5. Langkah akhir adalah memberikan saran jika ditemukan sesuatu yang dapat diperbaiki.